

Pengaruh Modal Sosial pada Pembentukan *Public Sphere* di Twitter: Studi Kasus Isu Tes Wawasan Kebangsaan KPK dengan Pendekatan Kuantitatif Relasional

Meirza Luthfi Pradana¹

Diserahkan: 14 Juli 2022 | Diterima: 18 April 2023 | Diterbitkan: 28 Agustus 2023

Abstrak

Kajian ini membahas bagaimana peran modal sosial dalam meningkatkan keterlibatan aktif oleh netizen pada public sphere di media sosial. Modal sosial merupakan sekumpulan nilai informal yang menyebar di antara anggota kelompok sehingga memungkinkan terjadinya kerja sama kolektif. Tulisan ini menggunakan isu tes wawasan kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (TWK KPK) sebagai studi kasus. Sebab, isu ini berkaitan dengan adanya wacana pelemahan KPK yang dilakukan oleh penguasa. Kajian ini mengambil pendekatan kuantitatif relasional melalui Social Network Analysis (SNA) dan analisis sentimen. Visualisasi SNA berbentuk nodes dan edges menampilkan informasi berupa top influencer dan top engaged tweets. Analisis sentimen diukur dengan tiga metrik, yakni amplifikasi, aplaus, dan tingkat percakapan per unggahan. Data pada kajian ini diperoleh dari Twitter yang telah diolah dengan instrumen Big Data Analytics. Rentang waktu pengambilan data dilakukan dari tanggal 16 Mei hingga 13 September 2021. Hasil kajian memperlihatkan bahwa aktor-aktor dengan kredibilitas tinggi di dunia nyata memanfaatkan modal sosial yang dimiliki saat menggunakan Twitter. Karenanya, terjadi peningkatan keterlibatan aktif oleh netizen lewat banyaknya muatan sentimen yang diperoleh. Mayoritas citra sentimen dalam kajian ini

1 Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: meirzaluthfi@mail.ugm.ac.id.

didominasi oleh sentimen negatif atau mengindikasikan kontra terhadap pelaksanaan TWK KPK.

Kata kunci: *Modal Sosial; Public Sphere; TWK KPK; Twitter; Social Network Analysis; Analisis Sentimen*

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas bagaimana bekerjanya modal sosial berdampak terhadap peningkatan keterlibatan (*engagement*) netizen secara aktif pada *public sphere* di media sosial. Modal sosial merupakan sekumpulan nilai informal atau norma yang menyebar di antara anggota kelompok yang memungkinkan kerja sama antara mereka (Malik & Dwiningrum, 2017). Modal sosial tersebut berkaitan erat dengan aktivitas aktor-aktor dalam arus perbincangan menyangkut isu tes wawasan kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (TWK KPK) di *Twitter*. Tujuan dari kajian ini untuk mengetahui seberapa jauh *public sphere* di *Twitter* dapat terpengaruh oleh adanya modal sosial dari aktor-aktor yang memiliki latar belakang kredibel di dunia nyata. Pasalnya, terdapat kecenderungan munculnya opini publik sesuai dengan kehendak aktor-aktor tersebut.

Kajian ini bermaksud menjelaskan tentang opini publik yang dominan muncul setelah aktor-aktor di *Twitter* menggunakan modal sosial miliknya masing-masing.

Ada dua alasan mengapa tema ini menarik untuk ditelisik lebih jauh. *Pertama*, modal sosial yang dimiliki oleh aktor-aktor tersebut notabenebernyanya berasal dari citra yang ditampilkan mereka di dunia nyata sehingga menjadi menarik ketika citra di dunia nyata tersebut dapat dialihfungsikan demi mendukung kepentingan para aktor di media sosial. *Kedua*, *public sphere* di media sosial pada awalnya belum tentu dapat terjadi. Sebab, karakteristik media sosial dan ruang siber di internet tidak dilengkapi dengan norma-norma atau nilai-nilai yang disepakati bersama oleh seluruh penggunanya. Oleh karenanya, kegunaan modal sosial dalam meningkatkan keterlibatan pengguna untuk memperbincangkan suatu isu yang sama menjadi menarik untuk dibahas.

Studi kasus yang ditampilkan berhubungan dengan prospek KPK sebagai salah satu lembaga sampiran negara di tengah keberlangsungan hegemoni negara dalam wujud tes wawasan kebangsaan (TWK). Bertolak dari pendapat Pagano (2010), kelahiran lembaga-lembaga sampiran negara erat kaitannya dengan tingginya kecurigaan publik (*public distrust*) terhadap lembaga-lembaga negara yang sudah ada tetapi masih belum berfungsi secara maksimal. Ketidakpercayaan publik yang memelopori terciptanya lembaga sampiran negara sejatinya berasal dari kegagalan lembaga negara utama dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, yangmana lembaga negara utama benar-benar gagal menjalankan fungsi dan tugasnya secara mutlak atau lembaga negara utama gagal karena fungsi dan tugas yang diemban terlalu banyak (Pageno, 2010).

Ada anomali *public trust* ketika lembaga sampiran negara selaku lembaga pendukung pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga negara utama, pada realitanya lebih mendapat kepercayaan dari publik daripada lembaga negara utama itu sendiri. Mengingat, penciptaan lembaga sampiran negara memang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan operasional sehari-hari lembaga utama negara yang sudah berkembang semakin kompleks (Iswandi & Prasetyoningsih, 2020). Perbincangan opini terkait lembaga sampiran negara—yang pada proses kelahirannya sarat diwarnai rasa ketidakpercayaan publik atas lembaga negara utama—menjadi relevan sebagai sebuah studi kasus. Terlebih, tatkala lembaga sampiran negara tersebut tengah dirundung isu kontroversial.

Ihwal pemilihan KPK sebagai bahan kajian secara spesifik didasarkan pada dua sebab. *Pertama*, KPK dinilai sebagai lembaga yang berperan penting dalam praktiknya, lantaran memiliki banyak cakupan kasus yang telah berhasil ditangani. Sejak pertama kali disahkan melalui UU No. 30 Tahun 2002

hingga bulan Oktober 2019, terhitung KPK telah sukses memproses 1.064 orang dan korporasi yang tersandung kasus korupsi (Welianto, 2020). Jumlah tersebut terdiri dari 255 anggota dewan, 27 kepala lembaga dan menteri, empat duta besar, tujuh komisioner, 20 gubernur, 110 walikota dan bupati, 208 pejabat eselon I hingga III, 22 hakim, delapan jaksa, dan dua polisi. Selain itu, ada pula 111 pengacara, 266 orang dari swasta, enam korporasi, dan 118 sipil yang terdeteksi melakukan tindak pidana korupsi (Welianto, 2020). Banyaknya cakupan kasus yang telah ditangani oleh KPK menjadi bukti KPK mampu mengisi tugas penanganan tindak pidana korupsi secara utuh demi membantu Kepolisian dan Kejaksaan selaku lembaga negara utama yang juga memiliki tanggung jawab pokok lain di saat bersamaan (Pageno, 2010).

Kedua, kehadiran KPK dianggap sebagai refleksi upaya menjaga keberlangsungan demokrasi di negara ini. Korupsi yang menjadi ranah wewenang KPK dalam penanganannya, tergolong merupakan sebuah patologi pada birokrasi. Diamond (2015) berpendapat bahwa keberadaan patologi birokrasi sangat memengaruhi cepat atau lambatnya proses transisi ke arah demokratisasi. Salah satu aspek penilaian kesuksesan proses transisi ke arah demokratisasi, tercermin lewat berlangsungnya pemerintahan efektif (*effective government*) di suatu negara (Lauth, 2011).

Oleh karenanya, korupsi yang merupakan jenis patologi birokrasi tidak boleh dibiarkan marak terjadi dalam negara yang hendak menerapkan demokrasi secara utuh. Apabila korupsi marak terjadi di tingkatan elit sebagaimana pendapat Mahdi & Pratiwi (2011), maka akan muncul mobokrasi di tengah-tengah masyarakat. Mobokrasi merupakan mobilisasi demokrasi semata tanpa diiringi tindakan partisipatif dari masyarakatnya. Hal tersebut disebabkan karena negara condong dikuasai oleh cengkeraman kuasa oligarki (Mahdi & Pratiwi, 2011). Dengan begitu, KPK menjadi lembaga sampiran negara yang memiliki keberadaan cukup penting.

Namun demikian, independensi KPK kini dihadapkan pada revisi UU KPK yang mengubah beberapa hal esensial termasuk soal kepegawaian KPK itu sendiri. Pasca revisi UU KPK, pengangkatan penyidik KPK sekarang mesti berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Pegawai Negeri Sipil yang menerima mandat khusus dari Undang-undang. Menurut pendapat Oktavianto & Abheseka (2020), kondisi seperti ini lantas menimbulkan ketidakjelasan pada sistem kepegawaian KPK, yakni apakah status pegawai KPK tergolong merupakan Aparatur Sipil Negara atau justru sekadar pegawai kontrak.

Secara prosedural, pimpinan KPK lantas menetapkan pemberlakuan tes wawasan kebangsaan (Yahya, 2021). Tes wawasan kebangsaan merupakan kriteria wajib dalam proses alih status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelaksanaan tes wawasan kebangsaan sejatinya hendak mengukur tiga aspek, yakni integritas, netralitas ASN, dan antiradikalisme (Yahya, 2021). Namun, justru terkait aspek radikalisme ini kemudian menimbulkan polemik. Melalui dalih menangkis radikalisme, sejumlah oknum pegawai KPK turut diberhentikan dari jabatannya pasca dianggap tidak memenuhi standar penilaian tes wawasan kebangsaan. Khususnya, mereka yang kerap dilabeli sebagai radikal atau taliban hanya karena citra agamis yang mereka miliki di ruang publik (CNN Indonesia, 2021). Peneliti dari Voxpol Center menilai kondisi demikian merupakan sebuah manuver politis guna menyingkirkan pegawai-pegawai KPK yang selama ini memiliki rekam jejak bagus dalam penanganan kasus korupsi (CNN Indonesia, 2021).

Sebanyak 1.351 pegawai KPK telah mengikuti asesmen tes wawasan kebangsaan. Dari jumlah tersebut, 75 orang dinyatakan tidak lolos penelitian. Pada akhirnya, sejumlah 56 orang resmi diberhentikan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 1354 Tahun 2021 (Riana, 2021). Di antara 56 orang tersebut, terdapat nama-nama penyidik senior, yaitu Novel

Baswedan; Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap; Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antara Komisi dan Instansi (PJKAKI), Sujanarko; dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas), Giri Suprapdiono (Garnesia, 2021).

Tes wawasan kebangsaan diangkat menjadi fokus studi kasus dalam tulisan ini dikarenakan terdapat hegemoni negara terhadap KPK. Sebagaimana dijelaskan oleh Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, tes wawasan kebangsaan mencerminkan pelanggaran HAM berat. Sebab, terjadi praktik diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Praktik diskriminatif tersebut sejatinya melanggar ketentuan Pasal 94 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Kawilarang, 2021).

Pemilihan isu tes wawasan kebangsaan KPK sebagai studi kasus disebabkan pula karena isu tersebut dinilai dapat bermetamorfosa menjadi diskursus di ruang publik (*public sphere*), mengingat KPK merupakan lembaga negara dengan tingkat kepercayaan paling tinggi dari publik melebihi pamor kepolisian, pengadilan, DPR, bahkan partai politik (Firdaus, 2020). Tingginya popularitas KPK berasal dari kemampuannya untuk mempertahankan independensi di tengah wacana pelemahan dan kepentingan politik yang kerap menghadang selama ini (Oktavianto & Abheseka, 2020). Sementara di satu

sisi, telah terdapat klarifikasi normatif dari pihak pemerintah yang menyangkal tuduhan tes wawasan kebangsaan sarat akan nuansa politis karena tes wawasan kebangsaan sudah sesuai UU No. 19 Tahun 2019 (Farisa, 2021). Tulisan ini menilai perbedaan pandangan antara publik dan pemerintah seperti demikian dalam menafsirkan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan KPK berpotensi menciptakan diskursus di ruang publik (*public sphere*).

Public sphere yang hendak diteliti cakupannya berada dalam ranah dunia maya. Disrupsi teknologi internet yang berjalan seiring dengan proses sosial menjadikan diskursus dapat pula dilakukan pada ruang siber (*cyberspace*) atau dunia maya (Polat, 2005). Terdapat model relasi sosial baru yang pada akhirnya menyediakan kebebasan bagi setiap individu untuk melakukan banyak kegiatan secara virtual, termasuk pertukaran pendapat (Jenkins & Thorburn, 2003). Penjelmaan paling konkret dari *public sphere* baru dapat ditemukan pula dalam media sosial (Faisal, 2007).

Platform *Twitter* menjadi media paling tepat untuk mengetahui aktivitas pada *public sphere* di media social, khususnya bagi konteks Indonesia. Sebab, dari keseluruhan pengguna media sosial aktif di Indonesia yang mencapai 160 juta orang, 56% merupakan pengguna *Twitter* (Kemp, 2020). Masifnya penggunaan media sosial *Twitter* membuat topik

yang tengah tren seketika itu juga bisa langsung menjadi bahan perbincangan hangat warganet dengan frekuensi interaksi per detik yang mampu menyentuh angka hingga hampir tak terbatas (Pozzi *et.al.*, 2017).

Penjelasan dilakukan berangkat dari konsep *public sphere* milik Jürgen Habermas yang berevolusi seiring adanya perkembangan internet (Faisal, 2007). Karenanya, modal sosial secara konseptual maupun praktik mengambil peran penting sebagai komplemen agar *public sphere* dapat bekerja sesuai idealisme Habermas dalam ruang siber yang semula nihil *norms* dan *values* yang dapat disepakati bersama (*shared norms and values*). Data yang telah berhasil dihimpun dalam kajian ini diperoleh dari media sosial *Twitter* yang telah diolah dengan memanfaatkan instrumen *Big Data Analytics*. Rentang waktu pengambilan data dilakukan dari tanggal 16 Mei 2021 hingga 13 September 2021. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif relasional (*quantitative relational approach*) melalui pemanfaatan *social network analysis* (SNA) dan analisis sentimen sebagai instrumen metodologis.

METODE PENELITIAN

Data yang dihimpun dalam kajian ini berasal dari proses *crawling Twitter* pada Laboratorium Big Data milik PolGov UGM. Kajian ini menggunakan metode *social network analysis* (SNA) dan analisis sentimen dengan pendekatan kuantitatif relasional (*quantitative relational approach*). Menurut David Lazer (2011), SNA mampu memaparkan pengaruh dari posisi individu dalam sebuah jejaring sosial (*social network*) yang kerap dikaitkan dengan munculnya aspek otoritas maupun kontrol yang terjadi setelahnya terhadap individu lain. SNA juga dapat menampilkan relasi terstruktur antar aktor, yang kemudian divisualisasikan dan diukur menggunakan algoritma serta parameter tertentu (Dowding, 1995). Aktor-aktor yang terlibat di dalam jejaring sosial dicirikan dalam wujud *nodes* atau titik-titik, sedangkan keterhubungan antara tiap-tiap *nodes* disebut sebagai *edges* atau garis yang melintas. Jejaring sosial tersebut merentang luas dimana pusatnya berpijak pada sekelompok aktor yang mendapat atensi berlebih lantaran modal sosial yang dimilikinya (Everett & Borgatti, 2014).

Lingkup kajian metodologis SNA juga menjangkau terkait arah persebaran informasi atau opini di dalam jejaring sosial itu sendiri (Zygmunt *et.al.*, 2009). Dalam hal ini,

analisis sentimen berfungsi sebagai pelengkap SNA. Analisis sentimen pada jejaring sosial dilakukan dengan tujuan untuk mengekstraksikan informasi subyektif dari teks di bahasa alamiahnya (*natural language*) (Pozzi *et.al.*, 2017). Kalimat dengan muatan subyektif, biasanya memiliki konotasi positif, negatif, atau netral (Pozzi *et.al.*, 2017). Pentingnya mengklasifikasikan kalimat subyektif berdasarkan konotasi yang dikandungnya dikarenakan opini yang ada kadang disampaikan secara eksplisit ataupun implisit. Bahkan, dalam beberapa temuan juga terdapat kalimat ironi atau sarkas.

Penggunaan analisis sentimen mampu membantu untuk memahami persebaran informasi yang sejatinya memiliki potensi memengaruhi cara pandang atau pembentukan opini publik (Żukiewicz *et.al.*, 2018). Analisis sentimen dari ciutan-ciutan yang ada diangkat dalam kajian ini untuk menampilkan karakteristik *public sphere* sebagai tempat terjadinya politik informal. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hasil praktik politik informal yang direpresentasikan dari pembentukan opini individu dan kehendak (*individual opinion and will formation*), sebagaimana pendapat Habermas (1996) lewat muatan sentimen pada sampel cuitan yang ada. Berikutnya, tingkat popularitas dari sampel cuitan bersentimen tertentu memberikan gambaran terkait modal sosial yang digunakan oleh masing-masing aktor.

Pengukuran tingkat persebaran informasi dilakukan dengan *engagement metrics*. *Engagement metrics* merupakan cara mengukur suatu fenomena secara numeralia dan mempertimbangkan pula variabel-variabel terkait yang membuat fenomena tersebut lantas tersebar luas dalam jejaring sosial (Pallavicini *et.al.*, 2017). Terdapat tiga jenis tolok ukur dalam *engagement metrics*. *Pertama*, metrik amplifikasi, yang mana merupakan penghitungan komputasi guna melacak jumlah *retweet* cuitan di *Twitter*. *Kedua*, metrik aplaus, yang merepresentasikan persetujuan (*approval*) audiens terhadap suatu jenis konten, yang mana terekspresikan dengan *like* di *Twitter*. *Ketiga*, tingkat percakapan per unggahan, yang mana terlihat dari jumlah *reply* atau balasan di *Twitter* (Pallavicini *et.al.*, 2017).

PUBLIC SPHERE DAN MODAL SOSIAL SEBAGAI KERANGKA TEORITIK

Konsep *public sphere* yang mencerminkan bentuk interaksi sosial tanpa ada subordinasi sebagaimana pendapat Habermas (dalam Prasutomo *et.al.*, 2019), dipandang cukup relevan dengan tulisan ini. Pada *public sphere*, lingkungan sekitar tidak lagi dianggap penting atau tak ada sangkut pautnya dengan *public sphere* itu sendiri. Dalam situasi yang setara pada *public sphere*, menurut

Habermas (dalam Prasutomo *et.al.*, 2019), seseorang baru dikatakan memiliki nilai lebih daripada orang lain, tatkala dirinya memiliki argumen yang cukup masuk akal dalam berkomunikasi.

Konsep *public sphere* yang mengutamakan rasionalitas dirasa penting dalam membantu untuk memahami basis argumentasi milik aktor-aktor pada proses interaksi sosial. Habermas (dalam Prasutomo *et.al.*, 2019) mengungkapkan bahwa pada *public sphere*, penggunaan rasionalitas tatkala berpikir menjadi penting. Penggunaan rasionalitas dimungkinkan agar argumen yang tergolong sebagai alibi tak mendasar tidak menyesatkan pola pikir masyarakat umum. Sebab, menurut Habermas (dalam Prasutomo *et.al.*, 2019), justifikasi dari argumen yang kerap didiskusikan dalam *public sphere* mesti sejalan dengan kepentingan orang banyak. Itulah yang membuat *public sphere* berdasarkan pandangan Habermas (dalam Prasutomo *et.al.*, 2019) sangat inklusif, asalkan seseorang mau dan mampu menggunakan rasio berpikirnya.

Tulisan ini menilai bahwa kegunaan *public sphere* sebagai tempat praktik politik informal, memungkinkan terjadinya proses pembentukan opini sesuai kehendak tiap-tiap aktor yangmana merupakan hasil pertukaran rasionalitas dalam berinteraksi. Politik informal merupakan jaringan untuk

mengomunikasikan informasi dan sudut pandang tiap-tiap masyarakat (Habermas, 1996). Politik informal sudah barang tentu tidak terinstitusionalisasikan dan tidak didesain untuk mengambil keputusan, tetapi mengambil peranan sebagai pelaku diskursus dan komunikasi yang disebut proses pembentukan opini individual dan kehendak (*individual opinion and will formation*) (Habermas, 1996).

Tulisan ini menganggap bahwa perlu untuk mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan dari konsep *public sphere*, terutama saat *public sphere* dimanfaatkan sebagai tempat politik informal bekerja. Sebab, politik informal tak semapan politik formal (Prasetyo, 2012). Kelebihan *public sphere*, yakni menjadi media komunikasi tak terbatas (*unrestricted communication*). Di dalamnya, masalah-masalah baru dapat dirasakan dengan lebih sensitif, diskursus dapat dibawakan secara lebih luas dan ekspresif, identitas kolektif dan artikulasi kepentingan mampu disuarakan tanpa kendala, meski kadang bisa jadi terdapat distorsi yang dibungkus dengan embel-embel rasionalitas (Habermas, 1996). Kekurangan dari *public sphere*, yakni selalu dibayangi oleh ancaman represi dan eksklusi dari distribusi kekuasaan yang tak merata, kekerasan struktural, serta komunikasi yang terdistorsi secara sistematis (Habermas, 1996).

Tulisan ini menganggap proses dekonstruksi *public sphere* konvensional yang tergantikan dengan ruang siber sesuai pendapat Faisal (2007) membantu tulisan ini untuk lebih memahami model *public sphere* baru di internet. Berdasarkan pandangan Papacharissi (2002), internet tidak serta merta dapat menghadirkan *public sphere* yang ideal. Sebab, ruang siber yang diciptakan oleh internet merupakan ruang yang tak dapat dikontrol dan cenderung anarkis (Faisal, 2007). Ruang siber memunculkan kesadaran pasca ruang yang akhirnya membunuh kesadaran manusia akan ruang. Implikasinya, ruang sosial dapat tergantikan dengan ruang a-sosial yang bersifat siber (Faisal, 2007). Terlebih, ruang siber tidak memiliki fondasi *norms* dan *values* yang dapat disepakati bersama. Masing-masing entitas yang eksis dalam ruang siber memiliki pegangan *norms* dan *values*-nya sendiri-sendiri (Faisal, 2007).

Walau demikian, internet tetap dapat menarik perhatian masyarakat luas, yang kemudian dibuktikan dari adanya peningkatan partisipasi di dunia maya, yang setidaknya menurut Papacharissi (2002) menimbulkan kelahiran demokrasi baru. Mulanya, diskursus yang ada menjadi cenderung kurang substansial (Hill & Hughes, 1998). Tetapi, justru di tengah kondisi banyaknya pengguna internet yang mulai aktif dalam mengutarakan pendapatnya

masing-masing terlepas dari apa pun konteksnya, hal tersebut bakal menciptakan keberagaman opini yang semakin nyata adanya (Papacharissi, 2002). Setidaknya, kemunculan ruang siber telah menandai kehadiran sebuah ruang tanpa kontrol dan tanpa dominasi, dimana setiap orang bebas untuk mengekspresikan dirinya. Meminjam terminologi Jurgen Habermas, maka ruang siber adalah *“the true public sphere”* sebab ia merupakan ruang, dimana tidak ada relasi kuasa dalam setiap tindakan komunikasi yang dilakukan individu di dalamnya (Faisal, 2007).

Keberagaman opini yang hadir dalam ruang siber perlahan akan makin mengerucut dan menciptakan klaster-klaster tertentu yang disebabkan oleh fragmentasi kepentingan sosial pengguna internet (Papacharissi, 2002). Tak pelak tatkala klasterisasi terjadi, maka setiap perbincangan yang ada di internet perlahan tersaji serta memiliki pengaruh bagi mereka yang memang memiliki kesamaan ketertarikan dengan isu yang tengah gandrung dibahas. Awalnya, internet menjanjikan keterhubungan seluruh manusia tanpa terkecuali, tetapi lantaran klasterisasi itu terjadi, maka muncul grup-grup diskusi antar individu dalam skala kecil karena tidak semua orang tertarik dengan segala topik yang ada di internet (Papacharissi, 2002).

Tulisan ini menganggap bahwa kelayakan internet sebagai penyedia *public sphere* baru seperti pendapat Papacharissi (2002) berguna dalam memahami jenis diskusi antar penggunanya. Grup diskusi kecil yang hadir dalam internet lewat kesamaan topik bahasan antar penggunanya, merefleksikan konsep atau pandangan Habermas tentang “diskusi-diskusi di cafe atau warung kopi, dengan bahasan isu yang dapat dilakukan oleh grup-grup diskusi kecil” (Papacharissi, 2002).

Tulisan ini menganggap tatkala ruang siber yang irasional, anarkis, dan lebih bersifat a-sosial itu kemudian menciptakan klasterisasi, dimana pada akhirnya mempertemukan subyek-subyek atau entitas-entitas dalam grup-grup diskusi kecil, maka baik dipaksakan atau tidak bakal timbul dialog setara antar subyek terkait. Proses dialog antar subyek yang nantinya terjadi, berpeluang besar menghasilkan rasionalitas. Alasannya, menurut Habermas (dalam Prasutomo *et.al.*, 2019), rasionalitas hanya bisa dihasilkan melalui pertukaran pikiran manusia satu dengan manusia lainnya secara diskursif.

Kehadiran internet kemudian mengkomodasi kemunculan media sosial. Johannessen (2013) berpendapat bahwasanya komunikasi melalui media sosial bisa berkontribusi pada pengembangan diskusi dan debat publik. Artinya, media sosial memiliki peluang untuk menguatkan

keberadaan *public sphere* di ruang siber. *Public sphere* mudah tercipta di media sosial lantaran terdapat aspek modal sosial (*social capital*) yang berperan penting dalam proses *community building* (Johannessen, 2013).

Tulisan ini mengutarakan bahwa pemahaman atas modal sosial dapat membantu mengenali bekerjanya *public sphere* di ruang siber, khususnya pada media sosial. Modal sosial merupakan sekumpulan nilai informal atau norma yang menyebar di antara anggota kelompok yang memungkinkan kerja sama antara mereka (Malik & Dwiningrum, 2017). Keberadaan modal sosial dalam kehidupan masyarakat dapat menghidupkan kreativitas masyarakat tatkala menggunakan media sosial.

Selain itu, modal sosial memiliki fungsi sebagai mekanisme kontrol dalam bermedia sosial agar pengguna media sosial tidak melanggar norma yang berlaku (Malik & Dwiningrum, 2017). Di satu sisi, modal sosial juga mampu menjadi sarana membangun kohesi di masyarakat (Malik & Dwiningrum, 2017). Tulisan ini berpendapat bahwa kegunaan modal sosial tersebut dapat membuat pengguna memiliki persepsi yang sama sehingga meminimalisir potensi tindak anarkis, irasional, maupun keberadaan sifat a-sosial dalam *public sphere* yang bakal hadir di ruang siber.

Setelah mengetahui definisi dan fungsi modal sosial, berkaitan dengan unsur-unsur modal sosial perlu untuk dikenali. Sebab, unsur-unsur tersebut memengaruhi tingkat efektivitas modal sosial dalam merekatkan pengguna-pengguna media sosial hingga berkenan terlibat pada *public sphere*. Adapun ketiga unsur modal sosial, yakni *trust* (kepercayaan), *resiprokal* (timbal balik), dan interaksi sosial (Agin, 2012).

Aspek *trust* berawal dari adanya harapan pada sekelompok orang untuk bertindak sesuai norma-norma yang dianut bersama. Alhasil, timbul aksi-reaksi yang sifatnya resiprokal, seperti saling memberi, menerima, atau saling membantu pada proses interaksi sosial. Interaksi sosial secara bertahap semakin meluas dan bermetamorfosa menjadi semacam jaringan sosial yang lebih memungkinkan perluasan lingkup kepercayaan dan lingkup hubungan timbal balik dari tiap-tiap pengguna media sosial (Agin, 2012).

Dalam memaknai keberadaan modal sosial pada *public sphere* di media sosial, maka tulisan ini perlu mengimajinasikan adanya konektivitas antara tiap-tiap individu beserta jaringan sosial yang mengiringinya.

Pasalnya, jaringan-jaringan sosial di media sosial memberikan peluang bagi individu-individu untuk membangun serta menjaga semacam kedekatan koneksi yang pada dunia nyata justru bersifat lemah dan sukar untuk dijalin (Çela, 2015).

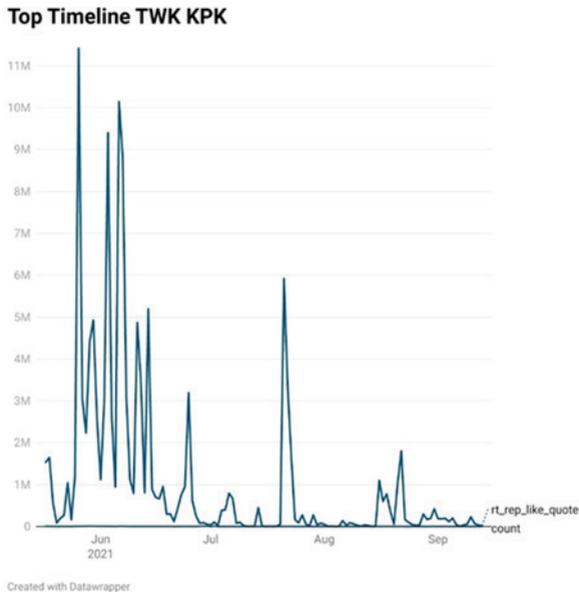
Dengan begitu, pengukuran modal sosial dilakukan berdasarkan penilaian atas kredibilitas dari setiap institusi atau individu-individu yang terlibat dalam *public sphere* sendiri (Çela, 2015). Taraf kredibilitas (*mutual credibility*), berkontribusi terhadap tingkat partisipasi di *public sphere* (Ellison *et.al.*, 2011). Dengan demikian, keberadaan institusi maupun individu yang dipandang kredibel atau layak untuk dipercaya lantas menciptakan *norm* dan *values* yang disepakati bersama (*shared norms and values*). Hal tersebut membantu tulisan ini untuk menjelaskan bekerjanya modal sosial terhadap peningkatan keterlibatan netizen di *public sphere* pada media sosial.

HASIL PENELITIAN

1. Bekerjanya Modal Sosial Sebagai Penyokong *Public Sphere* di Media Sosial

Langkah pertama yang dilakukan adalah pemetaan aktor yang menggunakan *Social Network Analysis*. Pemetaan aktor dapat membantu untuk memahami kecenderungan pola interaksi dalam media social sehingga berikutnya dijelaskan aktor-aktor kunci beserta latar belakangnya masing-masing, khususnya mengenai percakapan TWK KPK di *Twitter*.

Figur 1. Top Timeline TWK KPK

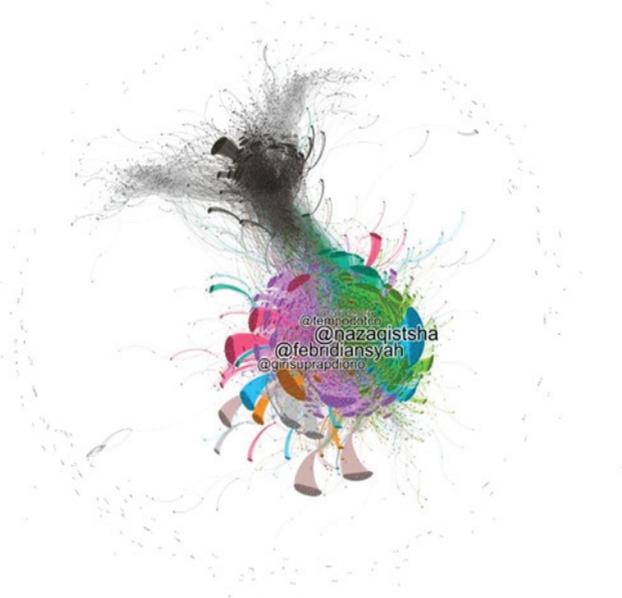


Sumber: Dokumentasi Penulis

Data yang telah diperoleh memiliki rentang waktu dari 16 Mei 2021 – 13 September 2021. Gambar pada Figur 1, memuat *Top Timeline* TWK KPK yang mencerminkan intensitas isu tersebut diperbincangkan menurut kronologi waktu. Intensitas perbincangan isu TWK KPK yang paling banyak terjadi berada di atas angka 11 juta eksposur sedangkan intensitas perbincangan isu TWK KPK paling rendah terjadi berada pada angka di bawah kisaran satu juta kali eksposur atau bahkan hampir mendekati nol.

Pemilihan rentang waktu dari 16 Mei 2021 – 13 September 2021 untuk pengambilan data dikarenakan isu TWK KPK sedang marak diperbincangkan pada tanggal-tanggal tersebut. Frekuensi perbincangan isu TWK KPK di *Twitter* tercatat paling banyak terjadi di bulan Juni 2021 atau bersamaan dengan awal kemunculan isu tersebut di media sosial *Twitter*. Sementara itu, frekuensi perbincangan isu TWK paling sedikit terjadi di bulan September 2021 atau berbarengan dengan adanya pemberitahuan bahwa pegawai-pegawai KPK akan diberhentikan per 30 September 2021. Hingga tulisan ini dibuat, TWK KPK masih saja menjadi perbincangan khalayak luas, maka mesti ada limitasi waktu dalam proses pengambilan data.

Figur 2. Visualisasi *Social Network Analysis*



Sumber: Dokumentasi Penulis

Pemetaan aktor sekilas ditampilkan dalam visualisasi SNA pada Figur 2. Visualisasi tersebut memperlihatkan akun-akun *Twitter* yang tergolong sebagai *top influencer*. *Top influencer* mengarah pada titik-titik atau *nodes* yang lebih dominan ketimbang lainnya. Menonjolnya nodes dominan disebabkan karena ada *engagement* cukup tinggi dalam ruang media sosial *Twitter*. Walau terlihat berdekatan, namun masih muncul nama-nama akun yang mempunyai popularitas tinggi dalam diskursus mengenai isu TWK KPK. Deskripsi lebih detail mengenai *top influencer* termuat dalam Figur 3.

Figur 3. Top Influencer TWK KPK

Top Influencer TWK KPK



Created with Datawrapper

Sumber: Dokumentasi Penulis

Top influencer terdiri atas lima akun yang dimuat dalam Figur 3. Lima akun tersebut adalah @nazaqistsha, @febridiansyah, @girisuprpdiono, @tempodotco, dan @cnnindonesia. Dari kelima akun, tiga di antaranya merupakan milik perseorangan sedangkan dua sisanya, @tempodotco dan @cnnindonesia merepresentasikan citra media pemberitaan di *Twitter*. Selanjutnya, tulisan ini melakukan identifikasi latar belakang masing-masing akun.

Akun @nazaqistsha dimiliki oleh Novel Baswedan yang pernah menjabat sebagai penyidik KPK. Semasa masih menjabat, Novel Baswedan bertugas menangani kasus-kasus yang menjerat sejumlah elit politik berpengaruh di Indonesia. Misalnya skandal korupsi yang dilakukan oleh mantan bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin dan penangkapan terhadap jaksa Akil Mochtar yang telah terbukti melakukan suap (Widhana, 2017).

Akun berikutnya, yakni @febridiansyah dikelola secara personal oleh Febri Diansyah. Dirinya pernah menjabat sebagai juru bicara KPK sebelum akhirnya mengundurkan diri pada tahun 2020 silam (Ramadhan, 2020). Melalui akun *Twitter* yang dimiliki olehnya, Febri Diansyah kerap mengunggah cuitan-cuitan berupa satir sehubungan dengan isu korupsi di Indonesia. Di satu sisi, Febri Diansyah juga merupakan seorang aktivis antikorupsi (Herawati, 2021). Terkini, Febri Diansyah dalam akun *Twitter*-nya bahkan sempat memberikan pandangannya mengenai kasus TWK KPK, yang menurutnya sangat berkaitan erat dengan kontestasi politik jelang Pemilu 2024 mendatang (Pratama, 2021).

Kemudian akun berikutnya adalah @girisuprapdiono yang dimiliki oleh Giri Suprapdiono. Dirinya pernah menjabat sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK. Namanya sempat menarik atensi masyarakat lantaran tidak lolos TWK KPK. Padahal, Giri Suprapdiono sudah malang melintang memberikan pembelajaran materi soal wawasan kebangsaan di berbagai kesempatan, mulai dari sekolah-sekolah, kampus, hingga bahkan lembaga negara (Kamil, 2021).

Dua akun terakhir yang terlihat dalam *top influencer* adalah akun @tempodotco dan akun @cnnindonesia. Akun @tempodotco dimiliki oleh portal pemberitaan *online* di Indonesia, yakni Tempo.co. Didirikan semenjak tahun 1995, portal pemberitaan tersebut mengusung motto senantiasa menampilkan berita yang tajam, cerdas, dan berimbang. Tempo.co juga mengklaim selalu menerapkan standar tinggi jurnalisme dalam meliput segala macam peristiwa agar dapat menghasilkan berita yang kredibel dan bisa dipercaya masyarakat (Tempo.co, 2022). Sementara itu, akun @cnnindonesia dimiliki oleh media pemberitaan CNN Indonesia. Konten yang kerap disajikan oleh CNN Indonesia mencakup berita nasional, internasional, bisnis, olahraga, teknologi, hingga hiburan (Naqqiyah, 2020). Pada saat isu, TWK KPK mencuat ke permukaan, baik akun @tempodotco maupun @cnnindonesia sama-sama rutin mengunggah reportase hasil liputannya ke dalam platform *Twitter*. Proses identifikasi latar belakang para pemilik akun *Twitter* memberikan gambaran tentang modal sosial yang dimiliki oleh masing-masing komunikator sebagai penunjang kredibilitasnya di media sosial. Terlebih, cuitan-cuitan yang dihasilkan oleh para pemilik akun *Twitter* di atas nyatanya memang memunculkan keterhubungan dan menjangkau banyak pengguna *Twitter* lain. Alhasil terdapat

keterlibatan atau interaksi yang dilakukan oleh netizen dengan cuitan-cuitan tersebut. Data berikut memperlihatkan cuitan-cuitan yang paling berhasil menarik atensi hingga akhirnya memunculkan respons dari netizen lewat aktivitas *like*, *comment*, *retweet* ataupun *quote* pada diskursus mengenai isu TWK KPK.

Figur 4. Top Engaged Tweet TWK KPK

Top Engaged TWK KPK

created_at	user_screen_name	text	rt_rep_like_quote
2021-05-26 05:46:05+07:00	@nazaqistsha	Walaupun Pak Presiden sdh arahkan, oknum Pimp KPK tetap ngotot utk singkirkan pegawai KPK dgn justifikasi TWK. Ini sdh diduga, dan makin tampak by design. Ini tahap akhir pelemahan KPK, maka harapan masy hrs diperjuangkan hingga tahap akhir yg bisa lakukan.	16,485
2021-06-03 08:28:38+07:00	@nazaqistsha	Prihatin, dan sedih adanya org yg berani "main kasus" di KPK. Lebih prihatin lagi krn Pak A. Damanik, Rizka, Yudi dan saya yg ungkap kasus ini justru diupayakan utk disingkirkan dgn alat TWK. Harapan memberantas korupsi mau dimatikan?	13,561

<p>2021-06-14 08:56:28+07:00</p>	<p>@nazaqistsha</p>	<p>Pak FB mengatakan hasil TWK 1274 lulus, 75 tdk lulus dgn soal dan waktu yg sama.faktanya FB yg paksakan ada TWK & hasilnya disembunyikan.Ini cara licik utk singkirkan pegawai KPK yg bekerja baik Berantas korupsi hrs Jujur.Tdk dgn pencitraan & kebohongan.</p>	<p>12,060</p>
<p>2021-06-07 10:49:41+07:00</p>	<p>@girisuprapdiono</p>	<p>OTT kpk sejak revisi UU KPK dan Kepemimpinan KPK dibawah Firli Bahuri.merah memudar.Semua anggota tim OTT 2020-2021 justru terjaring tes TWK untuk diberhentikan.Clear kan?</p>	<p>11,130</p>
<p>2021-07-21 13:15:28+07:00</p>	<p>@girisuprapdiono</p>	<p>Pegawai 75 Menangi Saran perbaikan Ombudsman RI:1. Presiden mengambil alih kewenangan alih status 75 pegawai2. Presiden membina ketua KPK, Menteri PANRB & kumham, Ketua LAN3. BKN membuat roadmap perbaikan4. Tes TWK distandarisasiTerima kasih Ombudsman RIHebat, Imparsial!</p>	<p>10,787</p>

Created with Datarwrapper

Sumber: Dokumentasi Penulis

Tabel 1. Detail Cuitan Pada *Top Engaged Tweet*

“Walaupun Pak Presiden sdh arahkan, oknum Pimp KPK tetap ngotot utk singkirkan pegawai KPK dgn justifikasi TWK. Ini sdh diduga, dan makin tampak by design. Ini tahap akhir pelemahan KPK, maka harapan masy hrs diperjuangkan hingga tahap akhir yg bisa lakukan.” -@nazaqistsha-

“Prihatin, dan sedih adanya org yg berani “main kasus” di KPK. Lebih prihatin lagi krn Pak A Damanik, Rizka, Yudi, dan saya yg ungkap kasus ini justru diupayakan utk disingkirkan dgn alat TWK. Harapan memberantas korupsi mau dimatikan?” -@nazaqistsha-

“Pak FB mengatakan hasil TWK 1274 lulus, 75 tdk lulus dgn soal dan waktu yg sama. Faktanya FB yg paksakan ada TWK & hasilnya disembunyikan. Ini cara licik utk singkirkan pegawai KPK yg bekerja baik. Berantas korupsi hrs Jujur. Tdk dengan pencitraan & kebohongan.” -@nazaqistsha-

“OTT kpk sejak revisi UU KPK dan Kepemimpinan KPK dibawah Firli Bahuri..merah memudar. Semua anggota tim OTT 2020-2021 justru terjaring tes TWK untuk diberhentikan. Clear kan?” -@girisupraddiono-

“Pegawai 75 Menang! Saran perbaikan Ombudsman RI: 1. Presiden mengambil alih kewenangan alih status 75. 2. Presiden membina ketua KPK, Menteri PANRB & kumham, Ketua LAN. 3. BKN membuat roadmap perbaikan. 4. Tes TWK distandarisasi Terima kasih Ombudsman RI Hebat, Imparsial!” -@girisuprapdiono-

Top engaged tweet dalam isu TWK KPK seperti pada Figur 4 dan Tabel 1, merepresentasikan bekerjanya modal sosial. Terdapat dua aktor yang memegang peran kunci dalam pemanfaatan modal sosial karena ada lima cuitan dari akun @nazqistsha dan @girisuprapdiono. Bekerjanya modal sosial sendiri berhubungan dengan tiga unsur yang melekat dalam modal sosial milik aktor-aktor tersebut.

Pertama, yakni *trust* atau kepercayaan (Agin, 2012). Rekam jejak Novel Baswedan dan Giri Suprapdiono yang gemilang dalam hal pemberantasan korupsi menjadikan sosok-sosok tersebut kredibel dan dipercaya masyarakat (Hardianingsih, 2021). Karenanya, mampu mendapat atensi berlebih dari netizen saat melontarkan ujaran-ujaran berkenaan tentang isu TWK KPK.

Kedua, yaitu adalah resiprokal atau timbal balik (Agin, 2012). Dalam konteks media sosial yangmana tidak menyediakan norma-norma dan nilai-nilai yang disepakati

bersama (*shared norms and values*), netizen bisa saja hanya melakukan aktivitas pasif, seperti *scrolling* lini masa atau sebatas menengok tren perbincangan di *Twitter* saat mengetahui isu TWK KPK menjadi viral. Dengan kata lain, netizen juga dapat bertindak a-sosial pada ruang siber media sosial.

Namun berkat modal sosial para aktor terkait isu TWK KPK yang bekerja, timbul hubungan timbal balik antara pembuat cuitan dengan netizen. Hubungan timbal balik tercermin dari aktivitas netizen dalam *me-retweet*, mengomentari, membuat *quote* dan juga menyukai cuitan-cuitan @nazaqistsha dan @girisuprapdiono. Aktivitas-aktivitas ini dapat digolongkan sebagai *engagement*.

Ketiga, yakni interaksi sosial (Agin, 2012). Maraknya hubungan timbal balik yang tersemai terhadap cuitan-cuitan dalam Figur 4, menjadikan kondisi interaksi sosial telah terpenuhi. Secara detail, interaksi sosial tercermin lewat jumlah total keseluruhan *engagement* dari akun milik Novel Baswedan dan Giri Suprapdiono. Tiga cuitan pada akun *Twitter* milik Novel Baswedan, masing-masing menghasilkan sejumlah 16.485, 13.561, dan 12.060 tingkat *engagement*. Sementara itu, dua cuitan dari akun *Twitter* milik Giri Suprapdiono mampu memperoleh sekitar 11.130 dan 10.787 tingkat *engagement*.

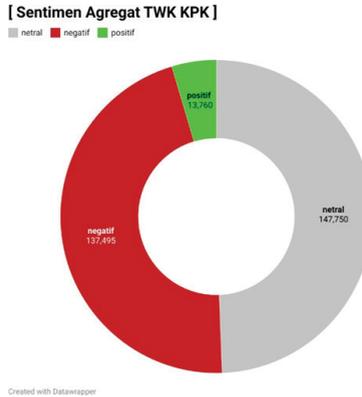
2. Analisis Sentimen Sebagai Tolok Ukur Opini Publik Pada *Public Sphere* di Media Sosial

Tulisan ini juga membahas terkait cerminan opini publik yang terlihat setelah modal sosial berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat pada *public sphere* di media sosial. Sebab, *public sphere* merupakan tempat bagi praktik politik informal yang ada di masyarakat (Habermas, 1996). Politik informal yang terjadi menstimulus diskursus dan komunikasi antar masyarakat sehingga menghasilkan pembentukan opini individual dan kehendak (*individual opinion and will formation*). Karenanya, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah analisis sentimen. Analisis sentimen bermanfaat guna menjelaskan posisi publik dalam mempersepsikan suatu isu menurut cara pandangya masing-masing (Pozzi *et.al.*, 2017).

Bagian ini menjelaskan analisis sentimen dengan merujuk satu per satu terhadap sentimen agregat. Sentimen agregat terdiri atas sentimen netral, negatif, dan positif yang tercermin dari tiap-tiap cuitan pada *public sphere* di *Twitter* menyangkut isu TWK KPK. Pengambilan sampel populer dilakukan untuk memudahkan proses analisis sentimen dan juga untuk mengetahui basis rasionalitas tiap-tiap pengguna *Twitter* dalam menyampaikan argumentasinya.

A. Sentimen Agregat

Figur 5. Sentimen Agregat TWK KPK



Sumber: Dokumentasi Penulis

Sentimen agregat menampilkan keseluruhan sentimen yang berhasil terlacak dalam proses penghimpunan data dari tiap-tiap sampel cuitan. Sentimen agregat yang tercermin dalam Figur 5 paling banyak merujuk pada sentimen netral (147.750 cuitan), lalu sentimen negatif (137.495 cuitan), dan yang paling sedikit adalah sentimen positif (13.760 cuitan).

B. Sentimen Netral

Figur 6. Sentimen Netral TWK KPK

[Sentimen Netral TWK KPK]

createdat	userscreenname	text	rtrep
2021-07-21 13:15:28+07:00	@girisuprapdiono	Pegawai 75 Menang! Saran perbaikan Ombudsman RI:1. Presiden mengambil alih kewenangan alih status 75 pegawai2. Presiden membina ketua KPK, Menteri PANRB & kumham, Ketua LAN3. BKN membuat roadmap perbaikan4. Tes TWK distandarisasiTerima kasih Ombudsman RIHebat, Imparsial!	
2021-06-06 09:30:59+07:00	@temponewsroom	Ketua KPK Firli Bahuri diduga sudah membuat daftar nama pegawai yang akan dipeka sejak November 2020. Ia ditengarai memaksa pemimpin KPK yang lain menyetujui TWK dan menyelundupkan pasal tersebut dalam peraturan KPK. #MajalahTempo	
2021-06-10 21:11:43+07:00	@fraksirakyatid	Alerta!! Aksi Serentak Di UdaraKetua KPK Firli Bahuri sudah terlalu ngad-ingadi.TWK diselundupkan, dipaksakan untuk singkirkan 75 nama pegawai KPK penyelamat uang negara. -A Thread-	
2021-07-06 15:54:07+07:00	@girisuprapdiono	TRANSPARANCY INTERNATIONALLembaga Internasional yg berpusat di Berlin bersurat ke Presiden Jokowi, tanda bahaya, alarm, pemberantasan korupsi di Indonesia.Pemahaman KPK, disempurnakan dgn upaya TWK u/ menyingkirkan pegawai simbol marwah KPK, membahayakan pemberantasan korupsi	

2021-06-04 16:22:53+07:00	@tempodotco	Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri absen dari undangan agenda debat yang dihadiri eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Giri Suprapdiono. #TempoNasional
2021-06-02 17:30:00+07:00	@cnnindonesia	1.351 pegawai KPK mengikuti TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Namun, dalam tes tersebut muncul beberapa pertanyaan 'konyol' yang ditanyakan kepada pegawai KPK. Lihat selengkapnya di #Infografis #CNNIndonesia

Sumber: Dokumentasi Penulis

Sentimen netral yang terlihat pada Figur 6 tercermin atas enam sampel cuitan dari @girisuprapdiono, @temponewsroom, @fraksirakyatid, @tempodotco, dan @cnnindonesia. Sampel cuitan tersebut memperlihatkan bahwa sentimen netral tidak berarti seseorang memiliki sikap apolitis. Sebab, muatan isi cuitan-cuitan tersebut terkadang tidak dapat terdeteksi secara jelas oleh *Artificial Intelligence* (AI) pada modul Big Data sehingga terdapat percampuran konotasi cuitan dalam sentimen netral, mengingat bahasa yang digunakan tiap cuitan sama-sama positif.

Cuitan-cuitan yang dikeluarkan oleh @temponewsroom, @cnnindonesia, dan @tempodotco tergolong netral dan obyektif lantaran memiliki latar belakang sebagai akun media

pemberitaan. Logika berpikir sebagai media pemberitaan menjadikan ketiga akun tersebut mengemas cuitan-cuitan terhadap isu TWK KPK secara informatif. Misalnya pada cuitan-cuitan di bawah ini:

Tabel 2. Detail Cuitan Pada Sentimen Netral

<p><i>“Ketua KPK Firli Bahuri diduga sudah membuat daftar nama pegawai yang akan didepak sejak November 2020. Ia ditengarai memaksa pemimpin KPK yang lain menyetujui TWK dan menyelundupkan pasal tersebut dalam peraturan KPK. #MajalahTempo.” -@temponewsroom-</i></p>
<p><i>“Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri absen dari undangan agenda debat yang dihadiri eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Giri Supradiono. #TempoNasional.” -@tempodotco-</i></p>
<p><i>“1.351 pegawai KPK mengikuti TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Namun, dalam tes tersebut muncul beberapa pertanyaan ‘konyol’ yang ditanyakan kepada pegawai KPK. Lihat selengkapnya di #Infografis #CNNIndonesia.” -@cnnindonesia-</i></p>

Ketiga akun *Twitter* tersebut sama-sama mempromosikan konten pemberitaan yang mereka produksi. Sebab, akun @temponewsroom menggunakan tagar #MajalahTempo

pada akhir cuitan sedangkan akun @tempodotco menggunakan tagar #TempoNasional yang menandakan bahwa berita dalam cuitan tersebut merupakan informasi berskala nasional. Terakhir, akun @CNNIndonesia secara persuasif mengarahkan netizen guna melihat infografis tentang isu TWK KPK yang telah mereka unggah ke media sosial.

Sementara itu, cuitan-cuitan yang dihasilkan oleh @girisuprpdiono maupun dari @fraksirakyatid mempersepsikan isu TWK KPK dengan konotasi negatif. Hal tersebut sebagaimana yang tertera berikut:

Tabel 3. Detail Cuitan Pada Sentimen Netral

*“Pegawai 75 Menang! Saran perbaikan Ombudsman RI:
1. Presiden mengambil alih kewenangan alih status 75 pegawai
2. Presiden membina Ketua KPK, Menteri PANRB & kumham, LAN
3. BKN membuat roadmap perbaikan
4. Tes TWK distandarisasi Terima Kasih Ombudsman RI Hebat, Imparsial!” -@girisuprpdiono-*

“TRANSPARANCY INTERNATIONAL Lembaga yg berpusat di Berlin bersurat ke Presiden Jokowi, tanda bahaya, alarm, pemberantasan korupsi di Indonesia. Pelemahan KPK, disempurnakan dgn upaya TWKu/menyingkirkan pegawai simbol marwah KPK, membahayakan pemberantasan korupsi.” -@girisuprpdiono-

“Alerta!! Aksi Serentak Di Udara. Ketua KPK Firli Bahuri sudah terlalu ngadi-ngadi. TWK diselundupkan, dipaksakan untuk singkirkan 75 nama pegawai KPK penyelamat uang negara. -A Thread-.” -@fraksirakyatid-

Tulisan ini menganggap bahwa cuitan-cuitan berkonotasi negatif dari @girisuprpdiono dan @fraksirakyatid berhubungan dengan latar belakang yang dimiliki mereka. Giri Suprpdiono selaku pemilik akun @girisuprpdiono pernah menjabat sebagai Direktur Sosialisasi dan Antikorupsi KPK (Kamil, 2021). Karenanya, cuitan-cuitan dari @girisuprpdiono bernada membela kepentingan pegawai KPK.

Cuitan pertama dari @girisuprpdiono yang dikeluarkan pada bulan Juli 2021, mempersepsikan pengajuan rekomendasi Ombudsman kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan polemik terkait isu TWK KPK sebagai sebuah “kemenangan”. Cuitan kedua dari @girisuprpdiono yang

dikeluarkan pada bulan Juni 2021 mengabarkan bahwa *Transparency International* berkirim surat kepada Presiden Jokowi untuk menyoroti adanya upaya pelemahan KPK lewat TWK KPK, yang dapat membahayakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Akun @fraksirakyatid adalah sebuah akun koalisi masyarakat sipil yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Karenanya, cuitan dari @fraksirakyatid hendak menyampaikan bahwa kepentingan masyarakat umum tengah dalam bahaya karena adanya isu TWK KPK.

C. Sentimen Negatif

Figur 7. Sentimen Negatif TWK KPK

[Sentimen Negatif TWK KPK]

createdat	userscreenname	text	rtreplikequote
2021-05-26 05:46:05+07:00	@nazaqistsha	Walaupun Pak Presiden sdh arahkan, oknum Pimp KPK tetap ngotot utk singkirkan pegawai KPK dgn justifikasi TWK. Ini sdh diduga, dan makin tampak by design. Ini tahap akhir pelemahan KPK, maka harapan masy hrs diperjuangkan hingga tahap akhir yg bisa lakukan.	16,485
2021-06-03 08:28:38+07:00	@nazaqistsha	Prihatin, dan sedih adanya org yg berani "main kasus" di KPK. Lebih prihatin lagi krn Pak A. Damanik, Rizka, Yudi dan saya yg ungkap kasus ini justru diupayakan utk disingkirkan dgn alat TWK. Harapan memberantas korupsi mau dimatikan?	13,561

2021-06-14 08:56:28+07:00	@nazaqistsha	Pak FB mengatakan hasil TWK 1274 lulus, 75 tdk lulus dgn soal dan waktu yg sama.faktanya FB yg paksakan ada TWK & hasilnya disembunyikan.Ini cara licik utk singkirkan pegawai KPK yg bekerja baik.Berantas korupsi hrs Jujur.Tdk dgn pencitraan & kebohongan.	12,060
2021-06-07 10:49:41+07:00	@girisuprapdiono	OTT kpk sejak revisi UU KPK dan Kepemimpinan KPK dibawah Firi Bahuri...merah memudar.Semua anggota tim OTT 2020-2021 justru terjaring tes TWK untuk diberhentikan.Clear kan?	11,130
2021-06-11 21:20:00+07:00	@nazaqistsha	Hasil assesment TWK sdh diminta oleh beberapa pegawai KPK tp tdk diberikan, malah membuat stigma seolah tdk bisa dibina.Hal ini makin menampakkan adanya niat yg tdk baik.Kalo tesnya jujur, kenapa hasil TWK harus disembunyikan? #BeraniJujurPecat#SaveKPK	8,143
2021-06-25 11:29:59+07:00	@nazaqistsha	Pada kontrak antara KPK (pihak Pertama) dgn BKN (pihak Kedua) terkait assesment TWK di point f, BKN bukan penentu lulus/tdk. Hasil asesmen yg mestinya diserahkan, KPK mengaku blm terima.Jd siapa yg berbohong?Ini sebenarnya asesmen atau operasi intelijen?	7,823

Sumber: Dokumentasi Penulis

Sampel negatif yang dihimpun dalam Figur 7 berasal dari akun @nazaqistsha dan @girisuprapdiono. Sepak terjang dari Novel Baswedan dan Giri Suprapdiono selaku pemilik kedua akun tersebut semasa mengabdikan di KPK menjadikan muatan cuitan yang dihasilkan berani secara terang-terangan kontra terhadap TWK KPK. Adapun detail cuitan-cuitan tersebut, yakni:

Tabel 4. Detail Cuitan Pada Sentimen Negatif

“Walaupun Pak Presiden sdh arahkan, oknum Pimp KPK tetap ngotot untuk singkirkan pegawai KPK dgn justifikasi TWK. Ini sdh diduga, dan makin tampak by design. Ini tahap akhir pelemahan KPK, maka harapan masy hrs diperjuangkan hingga tahap akhir yang bisa dilakukan.” -@nazaqistsha-

“Prihatin, dan sedih adanya org yg berani “main kasus” di KPK. Lebih prihatin lagi krn Pak A. Damanik, Rizka, Yudi, dan saya yg ungkap kasus ini justru diupayakan utk disingkirkan dgn alat TWK. Harapan memberantas korupsi mau dimatikan?” -@nazaqistsha-

“Pak FB mengatakan hasil TWK 1274 lulus, 75 tdk lulus dgn soal dan waktu yg sama. Faktanya FB yg paksakan ada TWK & hasilnya disembunyikan. Ini cara licik utk singkirkan pegawai KPK yg bekerja baik. Berantas korupsi hrs Jujur. Tdk dgn pencitraan & kebohongan.” -@nazaqistsha-

“Hasil assessment TWK sdh diminta oleh beberapa pegawai KPK tp tdk diberikan, malah membuat stigma seolah tdk bisa dibina. Hal ini makin menampakkan adanya niat yg tdk baik. Kalo tesnya jujur, kenapa hasil TWK harus disembunyikan? #BeraniJujurPecat #SaveKPK”. -@nazaqistsha-

“Pada kontrak antara KPK (pihak Pertama) dgn BKN (pihak Kedua) terkait assessment TWK di point f, BKN bukan penentu lulus/tdk. Hasil asesmen yg mestinya diserahkan, KPK mengaku blm terima. Jd siapa yg berbohong? Ini sebenarnya asesmen atau operasi intelijen?” -@nazaqistsha-

“OTT kpk sejak revisi UU KPK dan Kepemimpinan KPK dibawah Firli Bahuri..merah memudar. Semua anggota tim OTT 2020-2021 justru terjaring tes TWK untuk diberhentikan. Clear kan?”. -@girisuprardiono-

Terdapat kesamaan pola yang terbentuk berkenaan tentang pendapat akun-akun yang cuitannya terpampang dalam Figur 7. Novel Baswedan dan Giri Suprardiono menggunakan sudut pandang internal pegawai KPK dalam menyatakan bahwasanya TWK adalah bentuk pelemahan KPK. Hal ini dibuktikan dengan adanya ungkapan keprihatinan serta kekecewaan atas kegagalan selama pelaksanaan TWK KPK berlangsung. Keduanya menyoroti cara pimpinan KPK, Firli Bahuri yang memaksakan asesmen tersebut terus dilakukan. Terlebih hasil TWK tidak dipublikasikan secara transparan kepada pihak terkait. Sehingga mereka berpendapat jika TWK merupakan sebuah pembohongan publik.

Keduanya juga menyebutkan soal manuver politis dari pimpinan KPK yang telah mendepak keluar para pegawai KPK. Novel Baswedan dan Giri Suprapdiono menganggap bahwa intrik politik di tubuh KPK dapat membahayakan keberlangsungan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini sukses berjalan.

Sampel cuitan bersentimen negatif dari akun @nazaqistsha cukup mengundang atensi dari netizen, khususnya apabila dibandingkan dengan cuitan-cuitan sentimen lain. Cuitan dari akun milik Novel Baswedan tersebut memiliki taraf *engagement* sebanyak 16.385 kali. Antusiasme demikian dipicu dari rekam jejak Novel Baswedan semasa bertugas menjadi penyidik senior KPK. Selain itu, Novel Baswedan pernah menjadi korban penyiraman air keras oleh pihak tak dikenal (Hakim, 2021).

Hasilnya, citra Novel Baswedan sebagai sosok jujur dan berintegritas kemudian terbangun. Kredibilitasnya di muka umum menjadi sukar disangkal. Terlebih, apabila Novel Baswedan mengemukakan pendapatnya tentang situasi KPK pasca pelaksanaan TWK. Sosok Novel Baswedan lantas menjadi pedoman para pengguna *Twitter*.

Dalam *public sphere* tidak ada relasi kuasa yang bermain. Sebab, semua pengguna berada pada posisi setara dalam mengungkapkan opininya secara eksplisit maupun implisit (Faisal, 2007). Karenanya, netizen dapat secara leluasa mengambil sudut pandang serupa Novel Baswedan dalam menyikapi berkembangnya isu TWK KPK. Banyak pihak lalu menganggap TWK KPK sebagai upaya pelemahan KPK setelah proses pertukaran pikiran terlaksana secara rasional. Hal tersebut tercermin lewat jumlah *reply*, *retweet*, *like*, dan *quote* di *Twitter* dari cuitan Novel Baswedan.

D. Sentimen Positif

Figur 8. Sentimen Positif TWK KPK

[Sentimen Positif TWK KPK]

createdat	userscreenname	text	rtreplikequ
2021-05-17 22:07:01+07:00	@nazaqistsha	Proses TWK yg dibuat Pimp KPK "seolah 75 peg KPK tdk lulus itu" membuat stigma tdk berkebangsaan/tdk Pancasila. Alhamdulillah dgn pidato pak Presiden Jokowi telah membebaskan kami dari tuduhan itu. Terima kasih pak @jokowi, apresiasi atas perhatian bapak.	9,
2021-05-30 11:26:59+07:00	@sudirmansaid	Kebenaran tak bisa dikalahkan, meskipun bisa disalahkan. Selamat berjuang rekan-rekan KPK. Saya yakin nurani rakyat di belakang kalian, karena sejarah selalu mencari jalannya sendiri. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia.	4,

2021-06-24 11:26:27+07:00	@febridiansyah	Bapak sehat?Jadi benar bagian dari proses TWK ini aktivitas intelijen?Semoga sehat2 ya Pak... Dijauhkan dari marabahaya... Negeri ini butuh orang seperti Bapak.. Yg sangat setia.. Sangat berwawasan kebangsaan..	3,
2021-06-01 11:16:30+07:00	@generasimudanu	1) Hemat kami TWK KPK Penting meski banyak catatan, mengingat anggota Partai yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin semakin banyak masuk ke institusi pemerintahan.Dan kami tetap berkomitmen, dimana PKS berlabuh, kami dukung lawannya ..	2,
2021-09-09 22:04:14+07:00	@nazaqistsha	MA telah buat putusan peg KPK yg tdk lulus TWK mjd wewenang pemerintah.Stlh putusan MK dan MA, jg adanya Banding Administrasi, rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM yg diterima Presiden,selanjutnya tinggal respon bapak Presiden @jokowi Salam anti korupsi	
2021-07-21 13:10:42+07:00	@katabewe	1. DAHSYAT. Ada setitik oase yg muncrat dr Ombudsman ketika lembaga ini memutuskan 75 KPK yg tak lulus KPK harus jadi ASN sbilm 30 Oktober 2021. Bingo. Proficiat	

Sumber: Dokumentasi Penulis

Sentimen positif yang tercermin pada Figur 8 berasal dari akun @nazaqistsha, @febridiansyah, @sudirmansaid, @generasimudanu, dan @katabewe. Akun @nazaqistsha dan @febridiansyah kembali masuk dalam Figur 8 ini lantaran tergolong sebagai *top influencer* sedangkan akun lain turut terdeteksi karena taraf *engagement* dari cuitan-cuitan yang mereka keluarkan cukup tinggi dan jumlah data sentimen positif yang cukup rendah daripada citra sentimen lain.

Latar belakang akun-akun *non top influencer* yang turut masuk dalam Figur 8, terdiri dari Sudirman Said (mantan Menteri ESDM di kabinet Presiden Jokowi) selaku pemilik akun @sudirmansaid, Bambang Widjojanto (eks Komisioner KPK) sebagai pemilik akun @katabewe dan kelompok yang mengklaim merepresentasikan kepentingan generasi muda ormas NU di *Twitter* (@generasimudanu).

Muatan sentimen positif dalam tiap-tiap cuitan atas isu TWK KPK tidak serta merta berarti menandakan adanya upaya pembelaan atau pro terhadap kemunculan TWK KPK. Pemaparan berikut menjelaskannya secara detail:

Tabel 5. Detail Cuitan Pada Sentimen Positif

“Proses TWK yg dibuat Pimp KPK ‘seolah 75 peg KPK tdk lulus itu’ membuat stigma tdk berkebangsaan/tdk Pancasila. Alhamdulillah dgn pidato pak Presiden Jokowi telah membebaskan kami dari tuduhan itu. Terima kasih pak @jokowi, apresiasi atas perhatian bapak.” -@nazaqistsha-

“MA telah buat putusan peg KPK yg tdk lulus TWK mjd wewenang pemerintah. Stlh putusan MK dan MA, jg adanya Banding Administrasi, rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM yg diterima Presiden, selanjutnya tinggal respon bapak Presiden @jokowi. Salam anti korupsi”. -@nazaqistsha-

Tulisan ini telah memaparkan bahwa cuitan yang dihasilkan oleh akun @nazaqistsha memiliki indikasi kontra terhadap TWK KPK pada bagian penjelasan sentimen negatif. Namun, cuitan-cuitan dari @nazaqistsha rupanya kembali terlacak pada sentimen positif ini. Sebab, terkadang Novel Baswedan menggunakan kata-kata bernada “positif” tatkala mengeluarkan cuitan.

Pada Figur 8, Novel Baswedan terlihat bersyukur dan mengapresiasi tindakan Presiden Jokowi yang telah membebaskan para pegawai KPK dari tuduhan tidak nasionalis atau Pancasilais. Dalam cuitan lain, Novel Baswedan dengan penuh optimisme mengabarkan perkembangan isu TWK KPK yang telah ditangani dengan oleh MK, MA, Banding Administrasi, serta dari Ombudsman dan Komnas HAM.

Tabel 6. Detail Cuitan Pada Sentimen Positif

*“1. DAHSYAT. Ada setitik oase yg muncrat dr Ombudsman ketika lembaga ini memutuskan 75 KPK yg tak lulus KPK harus jadi ASN sblm 30 Oktober 2021. Bingo. Proficiat.”
-@katabewe-*

Akun @katabewe juga menggunakan kata-kata bernada “positif” berupa spirit optimistis. Bambang Widjojanto selaku eks Komisioner KPK menyatakan terdapat titik terang dalam pergumulan kasus TWK KPK setelah Ombudsman menegaskan bahwa pegawai yang tak lulus KPK harus diangkat menjadi ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021.

Pada cuitan tersebut, Bambang membubuhi kata “Bingo” atau berarti puas dengan hasil positif yang tiba-tiba muncul. Selain itu, Bambang juga mencantumkan kata “Proficiat” atau memperlihatkan ucapan selamat dan sukses pada akhir kalimat dalam cuitan yang diunggahnya. Alhasil, cuitan tersebut tergolong merupakan sentimen positif. Posisi Bambang Widjojanto di sini dapat diartikan pro terhadap pegawai KPK.

Tabel 7. Detail Cuitan Pada Sentimen Positif

“Kebenaran tak bisa dikalahkan, meskipun bisa disalahkan. Selamat berjuang rekan-rekan KPK. Saya yakin nurani rakyat di belakang kalian, karena sejarah selalu mencari jalannya sendiri. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia.” -@sudirmansaid-

Cuitan dari Sudirman Said bernada suportif membela kepentingan pegawai KPK. Dirinya mengibaratkan kondisi pegawai KPK yang tengah memperjuangkan haknya sebagai perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Tulisan ini menilai bahwa posisi Sudirman Said yang memihak pegawai KPK terpengaruh pula dari pola pikir serta tindakannya sendiri semasa menjabat di pemerintahan. Sebab, dahulu Sudirman Said pernah membongkar skandal kasus mafia migas “papa minta saham” yang turut menyeret nama Setya Novanto mantan Ketua DPR, yang kini berstatus tersangka korupsi E-KTP (Hikam, 2021). Dengan reputasi cukup bersih dan jujur saat berada di dalam lingkaran kekuasaan, Sudirman Said sukses mendapat atensi publik melalui cuitan bersentimen positif yang telah diunggahnya.

Tabel 8. Detail Cuitan Pada Sentimen Positif

*“Bapak sehat? Jadi benar bagian dari proses TWK ini aktivitas intelijen? Semoga sehat2 ya Pak... Dijauhkan dari marabahaya... Negeri ini butuh orang seperti Bapak... Yg sangat setia... Sangat berwawasan kebangsaan..”
-@febridiansyah-*

Cuitan dari akun @febridiansyah yang bernada satir juga masuk dalam sentimen positif. Cuitan tersebut berisi sindiran Febri Diansyah terhadap elit pimpinan KPK, dengan mengibaratkan proses pelaksanaan TWK sebagai aktivitas intelijen. Satir yang digunakan dalam cuitan tersebut seolah-olah memuji tindakan elit pimpinan KPK selaku sosok sangat setia dan sangat berwawasan yang dibutuhkan oleh negara. Tulisan ini menilai cuitan satir dari Febri Diansyah tersebut berkorelasi dengan alasan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Biro Humas KPK. Sebab, dirinya merasa tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi revisi UU KPK dan sejumlah polemik internal walau telah memegang jabatan tinggi di KPK kala itu (Ramadhan, 2020). Oleh karenanya, saat kondisi yang terus terjadi di

KPK kini semakin berada di luar jangkauannya, maka tulisan ini menganggap bahwa Febri Diansyah hendak melampiaskan kejengahannya terhadap situasi yang ada melalui cuitan tersebut.

Tabel 9. Detail Cuitan Pada Sentimen Positif

“1) Hemat kami TWK KPK Penting meski banyak catatan, mengingat anggota Partai yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin semakin banyak masuk ke institusi pemerintahan. Dan kami tetap berkomitmen, dimana PKS berlabuh, kami dukung lawannya...”
-@generasimudanu-

Cuitan dari akun @generasimudanu merupakan satu-satunya cuitan yang bernada mendukung pelaksanaan TWK KPK dalam sentimen positif. Dukungan akun @generasimudanu atas pelaksanaan TWK KPK disebabkan karena semakin banyaknya anggota partai PKS yang terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin masuk ke institusi pemerintahan. Karenanya, @generasimudanu mengambil posisi pro terhadap TWK KPK guna menghadapi kepentingan politis PKS.

Tulisan ini menilai bahwa konteks yang melatarbelakangi kemunculan cuitan seperti ini disebabkan karena adanya dugaan bahwa TWK KPK digunakan untuk menyingkirkan

pegawai KPK yang dilabeli “Taliban” (CNN Indonesia, 2021). Dengan basis aliran keagamaan yang berbanding terbalik, akun @generasimudanu hendak menjustifikasi pemecatan para pegawai KPK berlabel “Taliban” sebagai sesuatu yang wajar untuk dilakukan.

KESIMPULAN

Bekerjanya modal sosial telah memengaruhi peningkatan keterlibatan (*engagement*) aktif masyarakat pada *public sphere* di media sosial. Kredibilitas aktor-aktor yang menjadi ciri modal sosial paling berhasil dimanfaatkan oleh Novel Baswedan dalam melontarkan cuitan melalui akun @nazaqistsha. Karenanya, taraf *engagement* cuitan dari akun @nazaqistsha mampu memperoleh eksposur sebanyak 16.485 kali atau paling banyak di antara cuitan lain. Tingginya *engagement* cuitan tersebut membuktikan bahwa norma-norma dan nilai-nilai yang disepakati bersama (*norms and shared values*) sukses diciptakan dalam *public sphere* di internet, khususnya media sosial. Kondisi ini menepis argumen Faisal (2007) yang menyebutkan jika *public sphere* sukar terlaksana di internet lantaran tidak terdapat norma-norma dan nilai-nilai yang disepakati bersama (*norms and shared values*) dari para penggunanya.

Cuitan yang mendapat *engagement* tinggi dari akun @nazaqistsha tergolong ke dalam sentimen negatif. Sesuai dengan basis rasionalitasnya sebagai eks Pegawai KPK dan juga ketiadaan relasi kuasa yang bermain dalam *public sphere*, maka Novel Baswedan mampu menggiring perhatian netizen untuk merespons cuitan dari akun tersebut. Situasi tersebut merefleksikan bahwa keterlibatan aktor-aktor dengan kredibilitas mapan pada *public sphere* memang didasarkan pada motif-motif tertentu demi bisa turut serta dalam berjejaring.

Dengan demikian, modal sosial Novel Baswedan yang diukur dengan tingkat eksposur cuitan miliknya di *Twitter* memperlihatkan terjadinya *public sphere* pada media sosial *Twitter* selepas netizen tertarik untuk berpartisipasi secara aktif hingga memicu pula munculnya praktik politik informal. Tujuan awal dari politik informal sebagaimana pemaparan Habermas (1996), yakni untuk pembentukan opini dan kehendak individu, direpresentasikan dengan lugas melalui sentimen yang terkandung dalam cuitan paling populer milik @nazaqistsha atau dalam hal ini adalah sentimen negatif lantaran mengundang eksposur paling banyak di antara cuitan lain.

REFERENSI

- Agin, M. S. (2012). *Kelompok Mina Mawar Sebagai Bentuk Kemandirian Sosial Masyarakat Pasca Erupsi Merapi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Asyikin, N., & Setiawan, A. (2020). Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK . *Justitia Jurnal Hukum*, 126-147.
- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210-230.
- Çela, E. (2015). Social Media as a New Form of Public Sphere. *European Journal of Social Sciences Education and Research Volume 2, Issue 3* , 1-6.
- Diamond, L. (2015). Facing Up to the Democratic Recession. *Journal of Democracy*, Volume 26, Number 1, January 2015, 141-155.
- Domagala, K., Zielinski, M., & Żukiewicz, P. (2018). Social Network Analysis as a Research Method in Political Science. *An attempt to use it in Coalition Research*. 1-12.
- Dowding, K. (1995). Model or Metaphor? A Critical Review of the Policy Network Approach. *“Political Studies,”* Vol. 43, No. 1, 136-158.

- Ellison, N. B., Lampe, C., Steinfield, C., & Vitak, J. (2011). How Social Network Sites Affect Social Capital Processes. Dalam Z. Papacharissi, *A Networked Self. Identity, Community, and Culture on Social Network Site*. New York: Taylor & Francis.
- Everett, M. G., & Borgatti, S. P. (2014). Networks containing negative ties. *"Social Networks,"* No. 38, 111-120.
- Faisal, M. (2007). Dari Anarchic Cyber Space menjadi Transnational Public Sphere. Membaca Relasi antara Cyberspace dan Civil Society di Era Postmodern (Studi kasus: Greenpeace Online Activist). *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol. 9, No. 2, 138-151.
- Farisa, F. C. (2021). Soal Polemik Pegawai KPK, Ngabalin: Bukan Pembangkangan terhadap Presiden. *Kompas.com*. https://nasional.kompas.com/read/2021/05/28/15322601_soal-polemik-pegawai-kpk-ngabalin-bukan-pembangkangan-terhadap-presiden?page=all.
- Firdaus, S. (2020). Komparasi Model Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Reflektif Menemukan Bentuk Ideal KPK dalam Kacamata State-Centric. *Jurnal PolGov*, Vol. 2 No. 1, 151-191.
- Garnesia, I. (2021). Merunut Kinerja KPK Pasca Revisi Undang-Undang. *Tirto.id*. <https://tirto.id/merunut-kinerja-kpk-pasca-revisi-undang-undang-gf7e>.

- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Hakim, R. N. (2021). *4 Tahun Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan dan Misteri Sang Dalang*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/12/11114271/4-tahun-kasus-penyiraman-air-keras-novel-baswedan-dan-misteri-sang-dalang?page=all>.
- Hardianingsih, D. (2021). *Novel Baswedan Cs Diberhentikan dari KPK, Pak Giri Bikin Twit G30STWK*. JPNN.com. <https://www.jpnn.com/news/novel-baswedan-cs-diberhentikan-dari-kpk-pak-giri-bikin-twit-g30stwk?page=2>.
- Herawati, N. (2021). *Satire ala Febri Diansyah, Kisah Pencuri Sapi yang Meminta Maaf*. Seputartangsel.pikiran.rakyat.com. <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143151845/satire-ala-febri-diansyah-kisah-pencuri-sapi-yang-meminta-maaf?page=3>.
- Hikam, H. A. (2021,). *Sudirman Said Bongkar Cerita Mafia Migas hingga "Papa Minta Saham"*. Detik Finance. <https://finance.detik.com/energi/d-5545997/sudirman-said-bongkar-cerita-mafia-migas-hingga-papa-minta-saham>.
- Hill, K. A., & Hughes, J. E. (1998). *Cyberpolitics: Citizen Activism in the Age of the Internet*. New York: Rowman & Littlefield.

- Indonesia, C. (2021). *Kartu Mati Pelemahan KPK: Radikalisme, Taliban, & Nilai Merah*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210528073926-12-647698/kartu-mati-pelemahan-kpk-radikalisme-taliban-nilai-merah>.
- Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. (2020). Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol.1, No.2, 138-165. Diambil kembali dari Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia .
- Jenkins, H., & Thorburn, D. (2003). Introduction: The Digital Revolution, the Informed Citizen, and the Culture of Democracy. Dalam *H. Jenkins, & D. Thorburn, Democracy And New Media*, hal. 406. Massachusetts: The MIT Press.
- Johannessen, M. R. (2013). *Social Media as Public Sphere*. Kristiansand: Printing Office, University of Agder Kristiansand.
- Kamil, I. (2021). *Giri Suprapdiono Istilahkan Pemecatan Pegawai KPK "G30STWK"*. D *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/16/08093601/giri-suprapdiono-istilahkan-pemecatan-pegawai-kpk-g30stwk?page=all>.

- Kamil, I. (2021). *Profil Giri Suprpdiono, Pengajar Wawasan Kebangsaan yang Tak Lolos TWK*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/02/08454921/profil-giri-suprpdiono-pengajar-wawasan-kebangsaan-yang-tak-lolos-twk?page=all>.
- Kawilarang, R. (2021). KPK dan kontroversi TWK: Dipandang sebagai “Pelanggaran HAM Berat” dan Disebut Mirip Litsus era Orba dengan Pelabelan Anti-Pancasila. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57401804>.
- Kemp, S. (2020). Digital 2020: Indonesia. *Datareportal.com*. <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>.
- Lauth, H.-J. (2011). Quality Criteria for Democracy. Why Responsiveness is not the Key. Dalam G. Erdmann, & M. Kneuer, *Regression of Democracy?* hal. 260. Berlin: Springer.
- Lazer, D. (2011). Networks in Political Science: Back to the Future. *“PS: Political Science & Politics,” Vol. 44, No. 1*, 61-68.
- Malik, I., & Dwiningrum, S. I. (2017). Modal Sosial dan Media Sosial Pada Masyarakat Cyber di Desa Melung, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*.

- Naqqiyah, M. S. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Media Online CNN Indonesia.com dan Tirto.id Mengenai Kasus Pandemi Covid-19. *Jurnal Kopis: Kajian Penelitian dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam*, Volume 03, Issue 1, 1-10.
- Oktavianto, R., & Abheseka, N. M. (2020). Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5 (2), 117-131.
- Pageno, I. (2010). Peran dan Kedudukan Lembaga-Lembaga Sampiran Negara (*State Auxiliary Agencies*). *Academica*, 301-314.
- Pallavicini, F., Cipresso, P., & Mantovani, F. (2017). Beyond Sentiment: How Social Network Analytics can Enhance Opinion Mining and Sentiment Analysis. Dalam F. A. Pozzi, *Sentiment Analysis in Social Networks*, (hal. 13-29). Cambridge: Elsevier.
- Papacharissi, Z. (2002). The Virtual Sphere: The Internet as a Public Sphere. *New Media & Society* 4 (1), 9-27.
- Polat, R. (2005). The Internet and Political Participation. *European Journal of Communication*, 20 (4), 435-459.
- Pozzi, F. A., Fersini, E., Messina, E., & Liu, B. (2017). Challenges Of Sentiment Analysis In Social Networks: An Overview. Dalam F. A. Pozzi, E. Fersini, E. Messina, & B. Liu, *Sentiment Analysis in Social Networks*, hal. 1-11. Cambridge: Elsevier.

- Prasetyo, A. G. (2012). Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik. *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 16, Nomor 2, 169-184.
- Prastiwi, D. (2021). *3 Pernyataan Ngabalin Soal TWK Pegawai Disebut Upaya Pelemahan KPK*. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/news/read/4570465/3-pernyataan-ngabalin-soal-twk-pegawai-disebut-upaya-pelemahan-kpk>.
- Prasutomo, E., Wijaya, H., & Weismann, I. T. (2019). The Role of Public Sphere According to Jurgen Habermas's Perspective for Multicultural Societies in The Indonesian Context. *FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 1-13.
- Pratama, I. R. (2021,). *KPK Jawab Analisa Febri Diansyah yang Sebut Polemik TWK Berkaitan Kontestasi Politik 2024*. *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/07/kpk-jawab-analisa-febri-diansyah-yang-sebut-polemik-twk-berkaitan-kontestasi-politik-2024?page=2>.
- Ramadhan, A. (2020). Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin selama Setahun. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/19223411/mundur-dari-kpk-febri-diansyah-ungkap-pergulatan-batin-selama-setahun>
- Tempo.co. (2022). *Tempo.co*. Dipetik Mei 22, 2022, dari <https://www.tempo.co/about>

- Welianto, A. (2020). KPK: Sejarah dan Tugas Pokoknya. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/080000269/kpk-sejarah-dan-tugas-pokoknya>.
- Widhana, D. H. (2017). Kasus-Kasus Besar dan Jenderal yang Ditangani Novel Baswedan. *Tirto.id*. <https://tirto.id/kasus-kasus-besar-dan-jenderal-yang-ditangani-novel-baswedan-cmr4>.
- Yahya, A. N. (2021). BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/08/21291331/bkn-akui-antiradikalisme-jadi-salah-satu-aspek-twk-pegawai-kpk?page=all>.
- Zygmunt, A., Koźlak, J., Krupczak, Ł., & Małocha, B. (2009). Analiza Blogów Internetowych przy Użyciu. *Automatyka*, Vol. 13, No. 2, 673–681.